

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. .

Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan awal Renja
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. Perumusan rancangan akhir Renja
- e. Penetapan Renja.

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Yogyakarta yang ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing yang Unggul dalam Pelayanan Jasa. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya kemiskinan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
14. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
27. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
28. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2024;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA dan DPA SKPD.

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RenstraPerangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2022 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dari target fisik yaitu perolehan penilaian SAKIP oleh Inspektorat mencapai nilai A, berhasil direalisasikan nilainya A pula. Adapun tingkat realisasi keuangan program ini adalah 91,65 %. Terdapat 5 (lima) kegiatan di dalam program tersebut, dengan masing- masing realisasi fisiknya mencapai 100%. Lima kegiatan tersebut adalah:
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Aktivitas dalam kegiatan tersebut antara lain penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Aktivitas dalam kegiatan tersebut adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - c. Adiministrasi Umum Perangkat Daerah. Aktivitas kegiatan ini meliputi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

2. Program Pemberdayaan Sosial, dari target fisik berhasil direalisasikan sebesar 100 % pada semua sub kegiatannya. Adapun realisasi keuangan kinerja program sebesar 99,37%. Terdapat 1 (satu) kegiatan dalam program ini yaitu Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) daerah kabupaten/kota dengan 3 sub kegiatan yaitu:
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3. Program Rehabilitasi Sosial, mempunyai 2 indikator dengan capaian kinerja fisik yaitu:
 - a. Capaian fisik 109,42 % untuk indikator Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial. Terdapat 1 (satu) kegiatan pada indikator ini yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Dalam kegiatan ini mengakomodasi penyelenggaraan pengasuhan anak terlantar di RPA Wiloso Projo dan pelayanan sosial lanjut usia terlantar di RPSLU Budhi Dharma serta layanan rehabilitasi sosial lainnya.
 - b. Capaian fisik 100% untuk Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial. Pada indikator ini juga terdapat 1 (satu) kegiatan, yakni: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napsa di Luar Panti Sosial. Kegiatan ini dijabarkan dengan penyelenggaraan Layanan Kedaruratan meliputi Pelayanan Orang Terlantar Kehabisan Bekal dalam Perjalanan, Pelayanan Santunan Kematian, Pelayanan Shelter Covid 19, Pelayanan Shelter Mandiri di Wilayah, Penanganan Jenasah Terlantar. Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar meliputi Rekomendasi keringanan biaya pendidikan dan Kesehatan.

Adapun realisasi keuangan program ini adalah sebesar 82,75 %
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai 2 indikator dengan capaian kinerja fisik yaitu:
 - a. Capaian fisik sebesar 102 % untuk indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Terdapat 1 (satu) kegiatan pada indikator ini yaitu kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/ kota. Kegiatan ini meliputi Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota, Fasilitasi Bantuan Sosial

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

Kesejahteraan keluarga, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

- b. Capaian fisik 100% untuk indikator Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani. Pada indikator ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar. Pada kegiatan ini dilakukan upaya pendampingan dan monitoring evaluasi terhadap penerapan Standard Nasional pengasuhan anak di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Sedangkan realisasi keuangan program ini mencapai sebesar 85,38 %.

5. Program Penanganan Bencana, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100 %. Adapun realisasi keuangannya mencapai 60,47 %.

Program ini terdiri dari dua kegiatan antara lain :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota.
Aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi Penyediaan Makanan, Penanganan Khusus bagi Kelompok rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial.
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota
Aktivitas yang tercakup dalam kegiatan ini meliputi koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, mencapai realisasi kinerja fisik sebesar sebesar 100 % dari target dan realisasi keuangannya mencapai 98,18 %. Adapun program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

7. Program Perencanaan Tenaga Kerja, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 102,56 % dan realisasi keuangannya mencapai 95,19 %. Adapun program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.

8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100,14 % dan realisasi keuangannya mencapai 99,78 %. Adapun program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, antara lain:

- a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
Kegiatan ini melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerjaberdasarkan klaster kompetensi.
- b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Kegiatan ini melakukan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
- c. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
Kegiatan ini melaksanakan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil

9. Program Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 107,09% dan realisasi keuangannya mencapai 99,97 %. Adapun Program ini terdiri dari tiga kegiatan, antara lain:

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

- a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini antara lain penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerja, Perluasan Kesempatan Kerja.
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini antara lain pelayanan dan informasi pasar kerja online dan job fair/bursa kerja.
 - c. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
10. Program Hubungan Industrial, dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangannya mencapai 99,64 %. Adapun program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain :
- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini meliputi pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini meliputi pencegahan dan perselisihan hubungan industrial/mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, penyelesaian perselisihan hubungan industrial/mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi, Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100% dan realisasi keuangannya mencapai 99,60 %. Terdapat 1 (satu) kegiatan dalam program ini yaitu Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pelatihan Transmigrasi;
 - d. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi.

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

Pada tabel 2.1. dapat pula dianalisa pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja program Renstra bahwa capaian 13 (tiga belas) indikator kinerja program pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Terdapat 5 (lima) indikator program yang tingkat realisasi fisiknya mencapai > 100% dari target yang telah ditentukan, yaitu:
 - a) Program Rehabilitasi Sosial (109,42 %) untuk indikator Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial.
 - b) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (102,11 %) untuk indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial,
 - c) Program Perencanaan Tenaga Kerja (102,56 %) untuk indikator Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK),
 - d) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (100,14 %) untuk indikator Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal,
 - e) Program Penempatan Tenaga Kerja (107,09 %) untuk indikator Persentase penempatan tenaga kerja;
2. Terdapat 8 (delapan) indikator program yang tingkat realisasinya mencapai 100% dari target yang telah ditentukan, yaitu:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (100 %) untuk indikator hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat,
 - b) Program Pemberdayaan Sosial (100 %) untuk indikator Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif,
 - c) Program Rehabilitasi Sosial (100%) untuk Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial.
 - d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (100%) untuk indikator Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani.
 - e) Program Penanganan Bencana (100 %) untuk indikator Persentase korban bencana yang tertangani,
 - f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (100 %) untuk indikator Persentase makam pahlawan yang terpelihara,
 - g) Program Hubungan Industrial (100 %) untuk indikator Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial,
 - h) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (100 %) untuk indikator Persentase penempatan transmigran;

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

Realisasi kinerja program sesuai bahkan melebihi target fisik perencanaan disebabkan beberapa faktor:

1. Kelancaran koordinasi, kerjasama dan tingginya komitmen dengan mitra kerja/*stakeholder*;
2. Ketersediaan fasilitasi pendukung dari Dinas;
3. Kebijakan yang implementatif di daerah;
4. Regulasi yang jelas dan adaptif dengan dinamika di lapangan;
5. Perkembangan kondisi perekonomian.

Terkait dengan realisasi keuangan beberapa analisa penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa program khususnya yang *mengcover* kegiatan pemberian bantuan sosial, yang tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan pusat (Kementerian Sosial RI) yang memperluas sasaran penerima manfaat bantuan sosial d a r i pusat. Sementara di sisi lain terdapat pula kebijakan tidak diperkenalkannya penerimaan ganda bantuan sosial oleh 1 (satu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik dari anggaran pusat maupun bersumber dari anggaran daerah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya realisasi keuangan untuk program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial.
2. Program kegiatan bidang sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagian bersifat *unpredictable* kuantitas sarannya karena menyesuaikan dinamika kebutuhan lapangan. Hal ini menyebabkan pencapaian keuangan beberapa kegiatan kurang optimal (< 70%).
3. Terdapat kebijakan program yang merupakan kewenangan Pusat, sehingga implementasinya tergantung dari arahan Pusat baik terkait aspek teknis dan waktu pelaksanaannya.

Strategi perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk penyempurnaan performa kerja organisasi di masa mendatang antara lain:

- a. Perlu peningkatan kecermatan dalam perencanaan, terutama mengenai hal- hal yang sulit diprediksikan mengingat sebagian kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersifat adang-adang (*unpredictable*) karena keterkaitan dengan faktor-faktor dari luar;
- b. Pengelolaan basis data yang baik, sehingga kegiatan perencanaan akan selalu didukung dan didasarkan dengan data yang akurat.

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

<p>Yogyakarta, Disusun oleh Kepala DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p> <p>Dr. Maryuslon Tonang, M.M NIP. 19660614199031006</p>	<p>2023</p> <p>PEMBANGUNAN DAERAH</p>	<p>Yogyakarta, Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN</p> <p>Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004</p>
---	---------------------------------------	---

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi atas capaian kinerja layanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi termuat dalam Tabel 2.2. Dari tabel tersebut tampak bahwa target yang ditetapkan tahun 2022 tercapai. Di awal tahun 2022 ditetapkan target indikator kinerja urusan sosial tahun 2022 yakni Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 88,80%. Realisasi indikator ini sebesar 92,33% atau tingkat realisasi sebesar 103,98%. Pada urusan tenaga kerja, terdapat dua indikator kinerja yakni Persentase jumlah penganggur dan Persentase peningkatan upah minimum. Target indikator Persentase jumlah penganggur Tahun 2022 sebesar 9,12% - 4,86% dan terealisasi 7,18% atau tingkat realisasi sebesar 100%. Persentase peningkatan upah minimum ditargetkan sebesar 4.48 % dan terealisasi sebesar 7,93 % atau tingkat realisasi 176,98%. Tabel 2.2. juga mengakomodasi perubahan Renstra yang direncanakan pada awal tahun 2023 yaitu:

- a. Terdapat penambahan indikator kinerja OPD (terkait transmigrasi);
- b. Perubahan indikator kinerja OPD terkait kesejahteraan tenaga kerja yang semula diukur dari peningkatan Upah Minimum Kota menjadi persentase perusahaan yang melaksanakan struktur dan skala upah,
- c. Perubahan target terkait indikator penurunan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024.

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial			86.93	87.76	89.46	90.55	92.33	-	89.46	90.55	
2.	Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM): Persentase Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		100%	88.16%	89.47%	90.79%	100%	-	89.47%	90.79%	
	Persentase Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Persentase Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		100%	87.10%	90.32%	93.55%	100%	-	90.32%	93.55%	
	Persentase Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		100%	56.41%	56.41%	56.41%	100%	-	56.41%	56.41%	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

	Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti											
	Persentase Jumlah Warga Negara korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100	100%	-	100%	100%	
3.	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti dengan Pengiriman Transmigran				15.63%	18.75%	21.86%	-	-	15.63%	18.75%	
4a.	Persentase Jumlah Penganggur			9.12-4.86%	-	-	-	9.13	-	-	-	
4b	Tingkat Pengangguran Terbuka			-	8.63% - 8.98%	8.41% - 8.83%	8.31% - 8.68%		-	8.41% - 8.83%	8.31% - 8.68%	
5a.	Persentase Peningkatan Upah Minimum			4.48%	-	-	-	7.93%	-	-	-	
5b .	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah				3,8%-4,6%	4,6%-5,4%	5,4%-6,2%	-	-	4,6%-5,4%	5,4%-6,2%	

Tabel 2.2 juga menunjukkan capaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelayanan berbasis Standard Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Terdapat 5 (lima) indikator layanan SPM yang masing-masing tercapai 100 % sesuai target.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor internal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi antara lain :

- a. Kepatuhan pada perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan;

- b. Kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai unit kerja;
- c. Penetapan standar operasional yang jelas;
- d. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja secara berkala;
- e. Ketersediaan fasilitas pendukung dari Dinas.

Sedangkan faktor eksternal yang mendukung keberhasilan kinerja tersebut antara lain:

- a. Adanya kebijakan dan keberpihakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Kelancaran koordinasi, kerjasama dan komitmen yang tinggi dengan mitra kerja/stakeholder;
- c. Pemanfaatan jejaring kerja daerah dan nasional secara optimal;
- d. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik.

Meskipun faktor-faktor di atas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, bukan berarti pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjalan tanpa hambatan. Hambatan yang ditemui antara lain meliputi:

a. Urusan Sosial :

- Perbedaan kebijakan dan sistem yang berlaku pada lembaga mitra berdampak pada responsivitas lembaga tersebut dalam pelaksanaan kegiatan.
- Permasalahan sosial yang bersifat dinamis dan tidak dapat diperkirakan/diprediksi secara pasti, sehingga menyulitkan rencana intervensi penyelesaian masalah kesejahteraan sosial. Dengan kata lain cakupan ketugasan dan kegiatan pada urusan sosial sebagian besar bersifat adang-adang atau *unpredictable*. Hal ini juga menjadikan kesulitan tersendiri dalam menentukan target layanan SPM maupun target sasaran kegiatan.
- Kebijakan Satu Data Kemiskinan yang pendataannya dipusatkan pada Kementerian Sosial terdapat permasalahan dalam hal parameter, mekanisme pendataan, prosedur dan kecepatan akses data oleh daerah. Hal ini berdampak pada ketidaktersediaan data kemiskinan secara *real time* dan lebih lanjut dikhawatirkan terjadinya intervensi program yang tidak tepat sasaran.
- Kebijakan dan sistem administrasi keuangan yang belum support sepenuhnya untuk kelancaran penanganan masalah sosial yang sifatnya adang-adang.

- Kebijakan Pusat yang dinamis terkait bantuan sosial.
- b. Urusan tenaga kerja dan transmigrasi :
 - Terbatasnya minat pencari kerja hanya pada jenis-jenis pelatihan tertentu saja.
 - Informasi terkait pelatihan belum secara luas menjangkau masyarakat walaupun publikasinya sudah terintegrasi dalam JSS.
 - Animo masyarakat terhadap pelatihan tertentu kurang.
 - Masyarakat terlalu selektif dalam memilih pekerjaan terkait dengan lokasi maupun jenis pekerjaan. Lokasi yang dekat (dalam Pulau Jawa) dan jenis pekerjaan di dalam kantor lebih diminati masyarakat.
 - Kebijakan perusahaan yang belum memprioritaskan pemenuhan 8 komponen sarana hubungan industrial dan Struktur Skala Upah (SUSU).
 - Ketergantungan pemerintah daerah kepada Pusat terkait transmigrasi.

Adapun di awal tahun 2022 seiring dengan adanya ketentuan peraturan perundangan yang baru terkait SPM (Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM), maka layanan SPM beserta targetnya dicantumkan dalam perencanaan mulai pada Renstra OPD 2022 – 2026 hingga Renja OPD 2023 sebagaimana substansinya tercantum dalam tabel 2.2 tersebut di atas.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sasaran yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah penduduk yang mengalami kerentanan sebagai akibat dari permasalahan fisik/disabilitas, ketidakberdayaan karena usia gender dan sosial, ketiadaan kesempatan untuk melakukan investasi diri, kejadian bencana, eksploitasi serta guncangan ekonomi akibat bencana. Kelompok penduduk ini meliputi penyandang disabilitas, anak, perempuan, lanjut usia dan korban bencana, serta penduduk miskin dan rentan produktif yang terkendala kerentanan tertentu.

Hal mendasar yang perlu dipastikan dalam menangani kemiskinan dan kerentanan adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Bagi masyarakat yang tidak atau kurang potensial, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dapat diintervensi melalui aktivitas pemberian bantuan sosial. Aktivitas pemberian bantuan ini merupakan perwujudan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Direncanakan pemberian bantuan sosial dengan sasaran penerima lanjut usia miskin, warga miskin yang meninggal untuk

mendapatkan santunan kematian, warga miskin yang meninggal dan terlantar atau keluarganya tidak mampu untuk biaya pemakamannya dan bantuan untuk orang terlantar kehabisan bekal. Namun mengingat keterbatasan kemampuan APBD Kota Yogyakarta, maka diperlukan upaya transformasi melalui optimalisasi data kemiskinan untuk optimalisasi akses program penanggulangan kemiskinan dari APBN maupun APBD DIY.

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, basis data menjadi sangat krusial. Akurasi data kemiskinan mempunyai korelasi yang signifikan terhadap ketepatan sasaran, efisiensi dan efektivitas intervensi kemiskinan. Oleh karena diperlukan langkah pencermatan dan verifikasi validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang optimal dengan melibatkan unsur wilayah serta upaya pengusulan data kemiskinan ke Pusat (dalam hal ini Kementerian Sosial) secara optimal. Hal ini krusial dilakukan dalam mengakomodasi seluruh keluarga penerima manfaat sebagai sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan, baik bersumber dana dari Pusat, DIY maupun APBD Kota Yogyakarta. Dalam rangka mempercepat proses pengusulan data kemiskinan ke tingkat Pusat, maka perlu dilakukan peningkatan SDM dengan membentuk Petugas Entri Usulan DTKS di 45 (empat puluh lima) kelurahan seKota Yogyakarta. Selain itu diperlukan pula Kajian Profiling PPKS, sehingga tersaji Pemetaan PPKS dan analisa kebutuhan intervensi PPKS.

Dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial, Dinsosnakertrans berupaya untuk menyelenggarakan pelayanan berbasis Standar Pelayanan Minimal yg diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal. Dalam pelayanan berbasis SPM ini, maka diimplementasikan dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan Rehabilitasi Sosial dengan mengcover sasaran anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan pengemis dan korban bencana.

Berkenaan dengan lansia terlantar, diperlukan upaya perluasan layanan dengan menumbuhkembangkan Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) di wilayah. Dari aspek sosial, layanan tersebut dapat ditingkatkan dengan pendataan dan pemetaan lansia, Sapa Lansia dan *supporting* permakanaan khususnya bagi lansia terlantar.

Adapun berkaitan dengan penyandang disabilitas, permasalahan yang dirasakan diantaranya terkait penyediaan infrastruktur, aksesibilitas layanan dan tenaga pendamping yang kompeten. Dalam rangka pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka pada Tahun 2022 telah dilakukan inovasi dengan

dibangunnya Rumah Layanan Terpadu bagi Penyandang Disabilitas (RLD), namun masih perlu dilakukan penguatan fungsi, jenis dan jangkauan layanannya.

Khusus terkait penyandang disabilitas ODGJ, terdapat permasalahan antara lain adanya keterbatasan lama rawat di RS Ghrasia, keterbatasan tempat penampungan milik DIY, banyaknya ODGJ yang tidak punya keluarga. Akibatnya intervensi terhadap ODGJ dirasakan kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan OPD teknis terkait untuk membantu penanganan ODGJ yang dirumahkan oleh RS Ghrasia melalui pantauan kesehatan terpadu. Selain itu diperlukan layanan shelter bagi ODGJ yang tidak mempunyai keluarga dan tidak dapat ditampung oleh DIY.

Dari aspek upaya peningkatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan bagi sasaran PPKS yang potensial dilakukan dengan skema pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan motivasi dan pendampingan UEP PKH dan KUBE. Upaya yang perlu dilakukan adalah mengimplementasikan mekanisme pemetaan dan penilaian KUBE Berprestasi (Kategori Mandiri). Selain itu diperlukan pula peningkatan kapasitas KUBE agar “Naik Kelas” melalui kolaborasi program dengan OPD teknis terkait.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan anak pasca pengasuhan di UPT RPA Wiloso Projo, maka perlu dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk dapat memberikan beasiswa pendidikan. Selain itu diperlukan pula upaya membangun jejaring perusahaan untuk dapat menampung pekerja anak-anak pasca diasuh oleh RPA.

Berkenaan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terdapat permasalahan kurang aktifnya PSKS di beberapa wilayah yang antara lain disebabkan oleh multipel jabatan personil PSKS pada lembaga sosial masyarakat yang lainnya, kesibukan individu dan kurang bagusnya proses regenerasi kepengurusan PSKS di wilayah. Oleh karena itu diperlukan pengembangan strategi dalam peningkatan kapasitas dan motivasi bagi PSKS agar mempunyai komitmen tinggi dalam rangka membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masalah yang dihadapi adalah masih relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka akibat pandemi Covid-19. Selain itu masih banyaknya pencari kerja yang perlu dibekali dengan ketrampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, namun di sisi lain terdapat animo yang rendah dalam kepesertaan pelatihan ketrampilan tersebut. Dengan demikian perlu dikembangkan metode dan pemilihan jenis dalam penyelenggaraan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan dan dinamika pasar sehingga tepat guna.

Seiring dengan program pelatihan berbasis kompetensi, diperlukan

penambahan kuota untuk pemagangan sehingga pasca pelatihan teknis peserta dapat lanjut mengikuti program pemagangan untuk mengimplementasikan ketrampilan yang telah diperoleh dari pelatihan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan program pemagangan mampu mendorong peserta pelatihan untuk segera mendapatkan pekerjaan (mempercepat penempatan).

Mengingat di masa pandemi terdapat penurunan kesempatan kerja, maka perlu terobosan perluasan kesempatan kerja, antara lain dengan Job Canvasing ke Kawasan Industri dan pengembangan Job Fair secara Hibrid. Selain itu dalam rangka peningkatan layanan, maka perlu onlinisasi layanan ketenagakerjaan dan transmigrasi agar mempermudah dan mempercepat layanan.

Berkaitan dengan kesejahteraan dan hubungan industrial, terdapat isu belum seluruh perusahaan yang menerapkan ketentuan Struktur dan Skala Upah. Menjawab isu tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan motivasi bagi perusahaan melalui Olimpiade Struktur Skala Upah.

Isu lainnya adalah perlunya optimalisasi UMK pada perusahaan skala kecil, implementasi UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) pada perusahaan, optimalisasi pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan dan perlunya penurunan volume sengketa pekerja dan perusahaan. Menjawab isu tersebut, maka perlu optimalisasi KIE pada perusahaan antara lain Workshop teknis bernegosiasi bagi Serikat Pekerja (SP) dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antar SP dan pengusaha, dengan tujuan agar SP mempunyai kekuatan dalam melakukan dialog sosial. Bimtek penyusunan PKB bagi SP dan Pengusaha diperlukan untuk peningkatan kapasitas dalam penyelesaian sengketa.

Pembinaan sebagai salah satu implementasi KIE dilakukan pula untuk mewujudkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pembinaan tersebut meliputi sosialisasi regulasi ketenagakerjaan, diseminasi Upah Minimum Kota (UMK), menindaklanjuti pengaduan tenaga kerja, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hubungan kerja di perusahaan.

Selain itu perlu diupayakan peningkatan peran kelembagaan dalam hal kesejahteraan pekerja, yaitu antara lain Dewan Pengupahan Kota, Tim Deteksi Dini dan LKS Tripartit.

Dalam hal transmigrasi, terdapat permasalahan yaitu kurangnya animo/partisipasi warga miskin, kurangnya komitmen dan mental para transmigran dan

pembangunan kawasan daerah tujuan yang kurang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kerjasama daerah. Oleh karena itu para calon transmigran dididik, dilatih dan dibekali agar “siap” baik secara fisik, psikis maupun kapasitas personalnya untuk ditempatkan di daerah tujuan. Selain itu dalam rangka peningkatan minat warga miskin untuk bertransmigran perlu dioptimalkan jejaring dan peran tokoh masyarakat di wilayah dalam sosialisasi program transmigrasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta upaya penyelesaian permasalahan transmigran pasca penempatan juga perlu dilakukan secara optimal untuk meminimalisasi kegagalan transmigran di daerah penempatan. Dan juga perlu optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan advokasi pelaksanaan kerjasama daerah dalam program transmigrasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026. Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang mengakomodir hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.3.

Penyusunan program kerja tahun 2024 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan produk hukum ini berimplikasi pada struktur program kerja dan penganggaran perangkat daerah. Pada urusan sosial, klasifikasi program kegiatan telah selaras dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sosial sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, program kerja yang telah direncanakan telah memuat standar tersebut, meliputi pelayanan rehabilitasi sosial dasar terhadap 4 (empat) kelompok rentan (meliputi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis) dan penanganan korban bencana skala kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat.

Untuk Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merancang program kerja yang terdiri dari 1 program internal dan 9 program eksternal berdasarkan urusan. Terdapat 4 program, 6 kegiatan dan 31 sub kegiatan urusan sosial.

Sedangkan urusan tenaga kerja terdapat 4 program, 8 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Pada urusan transmigrasi terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Program-program yang dilaksanakan pada urusan sosial antara lain Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 570.905.000,00, Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp 3.749.588.380,00, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi Rp 2.184.791.030,00, dan Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran Rp 676.795.020,00, Program Rehabilitasi Sosial dalam hal ini telah mengakomodasi anggaran kegiatan/sub kegiatan pada UPT Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo dan UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar (RPSLU) Budhi Dharma. Dan khusus untuk program Rehabilitasi Sosial terdapat penurunan pagu anggaran dibandingkan rancangan awal RKPD antara lain karena menyesuaikan dengan kebijakan program kegiatan Bantuan Keuangan Khusus DIY yang belum ada kejelasan sehingga tidak diperhitungkan dalam Renja dan penyusunan Pra RKA tahun 2023.

Urusan tenaga kerja, terdiri dari Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 257.793.250,00, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 1.623.812.660,00, Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 778.991.250,00, dan Program Hubungan Industrial dengan alokasi sebesar Rp 981.328.250,00, Sedangkan urusan transmigrasi hanya terdapat 1 program yakni Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp 225.237.425,00.

Sedangkan operasional perkantoran dan pendukung manajemen dilaksanakan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.974.900.804,00. Anggaran tersebut juga memuat alokasi anggaran gaji dan tunjangan pegawai yang sebelumnya merupakan kelompok belanja tidak langsung. Pada program ini terdapat perubahan (sedikit penurunan) pagu anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian dengan ketentuan standard harga dan dinamika kebutuhan menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan.

Mencermati satu persatu program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan pada Renja ini, terdapat dinamika perubahan dibandingkan rancangan awal RKPD. Terdapat program kegiatan yang mengalami sedikit kenaikan pagu, namun di sisi lain banyak program kegiatan yang mengalami penurunan pagu. Secara keseluruhan berdasarkan analisis kebutuhan, penyesuaian standard harga dan penyesuaian implementasi kebijakan, maka secara total pagu anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi mengalami penurunan dari sebesar Rp. 25.434.987.166,- menjadi Rp. 25.024.143.069,- sebagaimana tertuang pada tabel 2.3. di bawah ini.

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12		
A		PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		13.974.900.804,00	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			13.974.900.804,00		
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18 dokumen	165.906.420,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 dokumen	165.906.420,00		
		a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	9.780.900,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	9.780.900,00	
		b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.570.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.570.000,00	
		c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 dokumen	1.880.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 dokumen	1.880.000,00	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

		Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.748.720,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.748.720,00	
		e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.058.720,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.058.720,00	
		f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan	146.868.080,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan	146.868.080,00	
	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	13 dokumen	11.249.995.200	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	11.249.995.200,00	
		a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	85 orang/bulan	11.155.939.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	80 orang/bulan	11.155.939.200,00	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

				Tunjangan ASN					Tunjangan ASN			
		b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	94.056.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11 dokumen	94.056.000,00	
	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah	41 laporan	24.615.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah	41 laporan	24.615.000,00	
		a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.320.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.320.000,00	
		b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.740.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.740.000,00	
		c	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	14.780.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	14.780.000,00	
		d	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.740.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.740.000,00	
		e	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2.610.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	2.610.000,00	
		f	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 dokumen	1.425.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.425.000,00	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

	4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	213 dokumen	5.220.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	213 dokumen	5.220.000,00
		a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	76 Dokumen	1.740.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	76 Dokumen	1.740.000,00
		b	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	910.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	910.000,00
		c	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	213 dokumen	2.570.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	132 dokumen	2.570.000,00
	5		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72 laporan	697.038.160,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72 laporan	697.038.160,00
		a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	10.674.440,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	10.674.440,00
		b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	110.089.120,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	110.089.120,00
		c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	31.736.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	31.736.500,00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

		d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	29.428.100,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	29.428.100,00
		e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.820.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.820.000,00
		f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 laporan	501.670.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 laporan	501.670.000,00
		g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 Dokumen	6.210.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.210.000,00
		h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	1.410.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.410.000,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 Jenis	135.786.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 Jenis	135.786.800,00
5		a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	58.198.900,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	58.198.900,00
		b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	77.587.900,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	77.587.900,00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 laporan	1.230.069.224,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 laporan	1.230.069.224,00
		a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	3.800.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	3.800.000,00
		b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.400.000,00
		c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.217.869.224,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.217.869.224,00
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	64 Jenis	466.270.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	64 Jenis	466.270.000,00
		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	22.300.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	22.300.000,00
		b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	296.920.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	296.920.000,00
		c	Pemeliharaan	Jumlah Mebel	15 unit	3.475.000,00	Pemeliharaan		Jumlah Mebel	15 unit	3.475.000,00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

			Mebel		yang Dipelihara			Mebel		yang Dipelihara		
		d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	43.575.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	43.575.000,00
		e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif		570.905.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				570.905.000,00
B			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			6 Lembaga	570.905.000,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			6 Lembaga	570.905.000,00
	1		a	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	55.710.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	55.710.000,00
			b	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 orang	177.583.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 orang	177.583.000,00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

		c	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 keluarga	30.960.000,00		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 keluarga	30.960.000,00	
		d	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 lembaga	306.652.000,00		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 lembaga	306.652.000,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.526.413.345,00		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.526.413.345,00	
C														
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	330 orang	1.069.309.000,00		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	330 orang	1.069.309.000,00	
	1													
		a	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	27.590.000,00		Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	27.590.000,00	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

		b	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	362 orang	643.364.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	362 orang	643.364.000,00
		c	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	122.656.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	122.656.000,00
		d	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	9.320.000,00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	9.320.000,00
		e	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	246.369.000,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	246.369.000,00
		f	Pemberian Pelayanan Penelusuran	Jumlah Orang yang Mendapatkan	5 orang	2.280.000,00	Pemberian Pelayanan Penelusuran	Jumlah Orang yang Mendapatkan	5 orang	2.280.000,00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

		Keluarga		Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Keluarga		Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
	g	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	17.730.000,0 0	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	17.730.000,0 0
		UPT. RPSLU BUDIDARMA				1.452.264.03 5,00	UPT. RPSLU BUDIDARMA				1.452.264.03 5,00
	a	Penyediaan Permakanan		Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	778.586.000, 00	Penyediaan Permakanan		Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	778.586.000, 00
	b	Penyediaan Sandang		Penyediaan Sandang Bagi Lansia di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	62.781.000,0 0	Penyediaan Sandang		Penyediaan Sandang Bagi Lansia di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	62.781.000,0 0
	c	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Reunifikasi keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dhamra	5 orang	16.350.000,0 0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Reunifikasi keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dhamra	5 orang	16.350.000,0 0
	d	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma	68 orang	594.547.035, 00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma	68 orang	594.547.035, 00
		UPT. RPA WILOSOPROJO				770.911.000, 00	UPT. RPA WILOSOPROJO REHABILITASI SOSIAL				770.911.000, 00
	a	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	30 orang	258.633.000, 00	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	30 orang	258.633.000, 00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

				Kewenangan Kabupaten/Kota				Kewenangan Kabupaten/Kota			
		b	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	56.740.000,00		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	56.740.000,00
		c	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	53.500.000,00		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	53.500.000,00
		d	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	231.108.000,00		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	231.108.000,00
		e	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	170.930.000,00		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	170.930.000,00
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan		457.104.345,00		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan		457.104.345,00
	2										

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

			Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani			Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani		
		a	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	174.297.345,00	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	174.297.345,00
		b	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	215.760.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	215.760.000,00
		c	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	67.047.000,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	67.047.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.184.791.030,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				2.184.791.030,00
D			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.184.791.030,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.184.791.030,00
	1	a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	144101 orang	1.599.861.030,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	144101 orang	1.599.861.030,00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

		b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32078 keluarga	423.620.000,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32078 keluarga	423.620.000,00
		c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	161.310.000,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	161.310.000,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	676.795.020,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			676.795.020,00
E			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		258.398.120,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		258.398.120,00
	1	a	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat	8000 orang	256.958.120,00	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat	8000 orang	256.958.120,00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

				(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			
		b	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000,00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000,00	
		c	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000,00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000,00	
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana	3 organisasi sosial	418.396.900,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana	3 organisasi sosial	418.396.900,00	
	2										
		a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kampung	2.160.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kampung	2.160.000,00	
		b	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	64 orang	416.236.900,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	64 orang	416.236.900,00	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

				Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			3.641.925.41 0,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			3.641.925.41 0,00
F			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	68,39	257.793.250, 00		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	68,39	257.793.250, 00
	1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	257.793.250, 00		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	257.793.250, 00
		a	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	257.793.250, 00		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang Disusun	1 dokumen	257.793.250, 00
G			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,88	1.623.812.66 0,00		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		91,88	1.623.812.66 0,00
	1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	320 orang	1.479.737.51 0,00		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	320 orang	1.479.737.51 0,00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

	a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	348 orang	1.479.737.510,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	348 orang	1.479.737.510,00
2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	51 LPK	125.182.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	51 LPK	125.182.000,00
	a	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 lembaga	125.182.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 lembaga	125.182.000,00
3		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	40 perusahaan/IKM/IKM	18.893.150,00	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	40 perusahaan/IKM/IKM	18.893.150,00
	a	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan	18.893.150,00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan	18.893.150,00
H		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	71,08	778.991.250,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	71,08	778.991.250,00
1		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan, perpanjangan PTKA (penggunaan Tenaga Kerja Asing) serta perluasan kesempatan	611 orang	606.694.500,00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan, perpanjangan PTKA (penggunaan Tenaga Kerja Asing) serta perluasan kesempatan	611 orang	606.694.500,00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

				kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri dan Padat Karya				kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri dan Padat Karya			
		a	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 orang	18.000.000,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK	300 orang	18.000.000,00	
		b	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	604 Oraang	17.360.000,00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terlaksananya Diseminasi dan Sinkronisasi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	604 Oraang	17.360.000,00	
		c	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	193 orang	571.334.500,00	Perluasan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja mandiri dan Tenaga Kerja Lokal yang mengikuti Padat Karya	193 orang	571.334.500,00	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	1350 orang	172.296.750,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	1350 orang	172.296.750,00	
2		a	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 orang	80.686.750,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Diseminasi dan sinkronisasi data forum Bursa Kerja Khusus Tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	200 orang	80.686.750,00	
		b	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	1350 orang	91.610.000,00	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya kegiatan pameran bursa	1350 orang	91.610.000,00	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

				Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				kerja (job fair)				
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial		981.328.250,00		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			981.328.250,00	
	1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perjanjian kerja di perusahaan	448 Perusahaan	246.145.500,00		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		448 Perusahaan	246.145.500,00	
		a	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 perusahaan	18.736.000,00		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 perusahaan	18.736.000,00
		b	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 perusahaan	13.987.250,00		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 perusahaan	13.987.250,00
		c	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta	362 laporan	213.422.250,00		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta	362 laporan	213.422.250,00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

				Jamsostek serta Pengupahan				Jamsostek serta Pengupahan				
	2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								735.182.750,00	
		a	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		4 perkara	186.008.500,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 perkara	186.008.500,00
		b	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		24 Perkara	21.378.000,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan	24 Perkara	21.378.000,00
		c	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		2 organisasi	94.318.000,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 organisasi	94.318.000,00

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

			Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				
		d	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	74.916.000,00		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	74.916.000,00	
		e	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	159 orang	358.562.250,00		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	159 orang	358.562.250,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			225.237.425,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			225.237.425,00	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			225.237.425,00		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			225.237.425,00	
J			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			225.237.425,00		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			225.237.425,00	
	1		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		6 KK	225.237.425,00		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		6 KK	225.237.425,00	
		a	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	52.870.000,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama dengan daerah tujuan	2 laporan	52.870.000,00	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

		b	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	8 kepala keluarga	44.889.500,0 0	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penempatan calon transmigran	8 kepala keluarga	44.889.500,0 0	
		c	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	8 kepala keluarga	43.477.925,0 0	Pelatihan Transmigrasi	Calon transmigrasi mengikuti pelatihan pra penempatan	8 kepala keluarga	43.477.925,0 0	
		d	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	8 kepala keluarga	84.000.000,0 0	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Pemberian perbekalan kepada calon transmigran	8 kepala keluarga	84.000.000,0 0	
Total								Total		25.024.143,0 69,00	25.024.143,0 69,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2024 telah mengakomodasi pula beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan. Usulan yang berasal dari masyarakat yang diterima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Usulan kegiatan bidang sosial yang diakomodir diantaranya Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih, Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM), Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas, Penumbuhan KUBE, Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas tidak Mampu, dan Sunatan Massal. Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, usulan yang diakomodir adalah Padat Karya Infrastruktur, Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pelatihan Keterampilan diantaranya Pelatihan Menjahit, Pelatihan Barista, Pelatihan Cake and Pastry, Pelatihan Social Media Marketing, Pelatihan Web Programmer, Pelatihan Membuat, Pelatihan Tata Rias Kecantikan, Pelatihan Stir Mobil & SIM A, Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran, Pelatihan Komputer, Pelatihan Satpam, Pelatihan Event Organizer.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Yogyakarta

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pelatihan Web Creator tingkat kota	Brontokusuman, Kampung timuran, Kota Yogyakarta	Pelatihan Web Programmer	40.000.000/Orang	DITELAAH
2	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, dan Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	20 Orang	DITELAAH
3	Pelatihan Lukis Sepatu, Tas & Baju tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Membuat	5 Orang	DITELAAH
4	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	5 Orang	DITELAAH

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

5	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Brontokusuman, RW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23 Kampung Karangajen, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	40.000.000/Orang	DITELAAH
6	Padat Karya Infrastruktur	Brontokusuman, RW 16, 17, 18, 19 Karanganyar, Kota Yogyakarta	Padat Karya Infrastruktur BKK (Bantuan Keuangan Khusus)	311.222.000/kegiatan	DITELAAH
7	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Brontokusuman RW 4, RW 5, RW 6, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	40.000.000/Orang	DITELAAH
8	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Karangwaru RT 39, RW 11, Kota Yogyakarta	Pelatihan Stir Mobil dan SIM A	4 Orang	DITELAAH
9	Pelatihan Satpam tingkat kota	RT 39 Karangwaru, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Satpam	3 Orang	DITELAAH
10	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Karangwaru, Kota Yogyakarta	Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, dan Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	30 Orang	DITELAAH
11	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Karangwaru, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	30 Orang	DITELAAH
12	Pelatihan Komputer tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Komputer	12 Orang	DITELAAH
13	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Notoprajan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Cake and Pastry	30 Orang	DITELAAH
14	Pelatihan Komputer tingkat kota	Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta	Pelatihan Komputer	25 Orang	DITELAAH
15	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta	Bantuan Sosial untuk Lanjut Usia Miskin	24 Orang	DITELAAH
16	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	Kotabaru, Kota Yogyakarta	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	6 Orang	DITELAAH
17	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kotabaru, Kota Yogyakarta	Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, dan Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	25 Orang	DITELAAH
18	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Pemuda Kampung Sosrokusuman Kelurahan Suryatmajan, Kota	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	1 Kelompok	DITELAAH

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

		Yogyakarta			
19	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Cake and Pastry	30 Orang	DITELAAH
20	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Cake and Pastry	20 Orang	DITELAAH
21	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Stir Mobil dan SIM A	10 Orang	DITELAAH
22	Pelatihan Membatik tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Membatik	30 Orang	DITELAAH
23	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kelurahan Semaki RW4, Kota Yogyakarta	Pelatihan Menjahit Dasar	25 Orang	DITELAAH
24	Pelatihan Membatik tingkat kota	Kelurahan Semaki Sibori RW 04 - Balai RW 04, Kota Yogyakarta	Pelatihan Membatik	25 Orang	DITELAAH
25	Pelatihan Manajemen Event Organizer tingkat kota	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta	Pelatihan Event Organizer	25 Orang	DITELAAH
26	Padat Karya Infrastruktur	Kelurahan Suryodiningratan, Kota Yogyakarta	Padat karya Infrastruktur BKK (Bantuan Keuangan Khusus)	1 Kegiatan	DITELAAH
27	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan Notoprajan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	35 Orang	DITELAAH
28	Pelatihan Barista tingkat kota	Demangan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Barista	100 Orang	DITELAAH
29	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Demangan, Kota Yogyakarta	Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, dan Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	20 Orang	DITELAAH
30	Pelatihan Barista tingkat kota	Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta	Pelatihan Barista	30 Orang	DITELAAH
31	Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran tingkat kota	Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta	Pelatihan Cake dan pastry	30 Orang	DITELAAH
32	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Gunung Getur, Kota Yogyakarta	Bantuan Sosial untuk Lanjut Usia Miskin	4 Orang	DITELAAH

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

33	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kelurahan Gunung Getur, Kota Yogyakarta	Pelatihan Menjahit Dasar	2 Orang	DITELAAH
34	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Kelurahan Gunung Getur, Kota Yogyakarta	Pelatihan Stir Mobil dan SIM A	3 Orang	DITELAAH
35	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Klitren, Kota Yogyakarta	Bantuan Sosial untuk Lanjut Usia Miskin	9.830.800/Orang	DITELAAH
36	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	10 Orang	DITELAAH
37	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Menjahit Dasar	30 Orang	DITELAAH
38	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Tata Rias Kecantikan	10 Orang	DITELAAH
39	Pelatihan Komputer tingkat kota	Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Komputer	30 Orang	DITELAAH
40	Pelatihan Web Creator tingkat kota	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Web Programmer	1 Orang	DITELAAH
41	Padat Karya Infrastruktur	Kelurahan Sorosutan RT 61 RW 16, Kota Yogyakarta	Padat Karya Infrastruktur BKK (Bantuan Keuangan Khusus)	1 Kegiatan	DITELAAH
42	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Sorosutan RW 06, Kota Yogyakarta	Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Miskin	20 Orang	DITELAAH
43	Pelatihan Menjahit Terampil tingkat kota	Kelurahan Bener, Kota Yogyakarta	Pelatihan Menjahit Terampil	20 Orang	DITELAAH
44	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	RW 09 Mrican Ponggalan Giwangan Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Tata Rias Kecantikan	20 Orang	DITELAAH
45	Pelatihan Web Creator tingkat kota	Balai RK Giwangan Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Web Programmer	30 Orang	DITELAAH

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

46	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	RW.01-RW.13 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	30 Orang	DITELAAH
47	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	1 Orang	DITELAAH
48	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	1 Orang	DITELAAH
49	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Warung boto, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	20.000.000/Orang	DITELAAH
50	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, dan Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	1 Orang	DITELAAH
51	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Penumbuhan KUBE	1 Kelompok	DITELAAH
52	Jaminan Kesehatan Khusus (JAMKESUS) Terpadu Khusus Penyandang Disabilitas Tidak Mampu KTP Kota Yogyakarta	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Jaminan Kesehatan Khusus (JAMKESUS) Terpadu Khusus Penyandang Disabilitas Tidak Mampu KTP Kota Yogyakarta	1 Orang	DITELAAH
53	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	30 Orang	DITELAAH
54	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	30 Orang	DITELAAH
55	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Warung boto, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	7.000.000/Orang	DITELAAH
56	Pelatihan Web Creator tingkat kota	Kelurahan Rejowinangun, Kota Yogyakarta	Pelatihan Web Programmer	30 Orang	DITELAAH
57	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Bantuan Sosial untuk Lanjut Usia Miskin	20 Orang	DITELAAH
58	Sunatan Massal Tingkat Kota	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Sunaatan massal tingkat kota	20 Orang	DITELAAH

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

59	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19, Kota Yogyakarta	Penumbuhan KUBE	7 Kelompok	DITELAAH
60	Pelatihan Membatik tingkat kota	Jl. Langastran Lor No. 17, Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Membatik	50 Orang	DITELAAH
61	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	20 Orang	DITELAAH
62	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	Kelurahan Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	1 Orang	DITELAAH
63	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	40 Orang	DITELAAH
64	Pelatihan Komputer tingkat kota	Kampung Dukuh, Kelurahan Gedongkiwo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Komputer	60 Orang	DITELAAH

Selain mengakomodir beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan pula usulan beberapa kegiatan dari masyarakat melalui Pokir (Pokok Pikiran Dewan) yang secara keseluruhan berjumlah 34 usulan. Usulan yang berasal dari wakil masyarakat (DPRD) yang diterima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dari 34 usulan tersebut 32 usulan diterima dan 2 ditolak berdasarkan prioritas dengan alasan bahwa usulan kegiatan bukan merupakan kewenangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Usulan kegiatan bidang sosial yang diakomodir diantaranya Pemberian Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM), Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih, dan Peumbuhan KUBE.

Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, usulan POKIR yang diakomodir adalah Pelatihan Membatik, Pelatihan Stir Mobil & SIM A, Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran, Pelatihan Barista, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Satpam, Pelatihan Cake and Pastry, dan Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota.

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

Tabel 2.5

Usulan Pokir dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	pelatihan menjahit sorjan	Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	pelatihan menjahit sorjan	50 orang	DITOLAK
2	pelatihan membuat batik	Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	pelatihan membuat batik	40 orang	DITELAHAH
3	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta	warga yang belum punya SIM tapi ada potensi menyopir	20 orang	DITELAHAH
4	Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran tingkat kota	Kelurahan Umbulharjo, Kota Yogyakarta	pelatihan keterampilan untuk peningkatan ekonomi keluarga	20 peserta	DITELAHAH
5	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	Pengadaan pelatihan ketrampilan olahan pangan / Bakso Tusuk	40 orang	DITELAHAH
6	Pelatihan Barista tingkat kota	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Menambah pengetahuan tentang kopi dan menjadi barista yang kompeten agar mendapatkan pekerjaan sebagai seorang barista maupun membuka usaha sendiri	20 orang	DITELAHAH
7	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kelurahan Umbulharjo, Kota Yogyakarta	pelatihan menjahit	20 orang	DITELAHAH
8	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Pakuncen, Kota Yogyakarta	untuk modal usaha beberapa warga yang jadi 1 kelompok	4 kelompok	DITELAHAH
9	Padat Karya Infrastruktur	Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta	Dengan program kali bersih maka diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan DAS	48 orang	DITELAHAH
10	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Kemantren Kota Yogyakarta	perlu pendampingan untuk menentukan usaha dan keberlangsungan usaha dan organisasi	20 orang	DITELAHAH
11	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Dengan adanya pembetian motivasi bagi keluarga penyandang disabilitas maka diharapkan dapat mengembangkan usahanya	20 orang	DITELAHAH

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

12	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Dengan adanya pelatihan pijat dasar bagi penyandang disabilitas mampu latih maka diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan	30 Orang	DITELAAH
13	Pelatihan Satpam tingkat kota	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Satpam	5 orang	DITELAAH
14	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Warungboto, Kota Yogyakarta	Pengajuan Pelatihan Montir dan SIM	40 orang	DITELAAH
15	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	Bantuan Berbentuk Langsung/ tunai ini di tujukan untuk para lansia yang sudah tidak memiliki penghasilan tetap tujuannya meringankan beban hidup mereka di jaman serba mahal, di wilayah kampung yudonegran dan sekitarnya.	2.082 Orang	DITELAAH
16	Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran tingkat kota	Kelurahan Muja muju, Kota Yogyakarta	Dapat mengembangkan bisnis usaha kulinernya menjadi lebih tertata secara manajemen usaha	20 orang	DITELAAH
17	Pelatihan Barista tingkat kota	Kelurahan Patangpuluhan, Kota Yogyakarta	Permohonan pelatihan barista di wilayah Rw 01 Patangpuluhan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai dunia usaha kopi. Diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha baru sebagai contoh warung kopi yang semakin diminati dari berbagai usia	20 Orang	DITELAAH
18	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Patangpuluhan, Kota Yogyakarta	Permohonan pelatihan Cake dan Pastry untuk warga di wilayah Rw 01 Patangpuluhan khususnya pemuda, dimaksudkan untuk menambah keterampilan pemuda dalam membuat Cake dan Pastry harapannya dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan membuka usaha berbekal pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah	20 Orang	DITELAAH
19	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Kelurahan Patangpuluhan, Kota Yogyakarta	Permohonan pelatihan Stir Mobil dimaksudkan agar warga dapat menerapkan praktek menyetir secara lancar serta menambah keterampilan bekal masuk ke dunia pekerjaan	40 orang	DITELAAH
20	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	antusiasme warga menjadi anggota KUBE cukup baik sehingga terus membutuhkan pendampingan serta bantuan dana terhadap usaha yang telah dibuat	4 kelompok	DITELAAH
21	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Lansia tidak memiliki pendapatan ini di data untuk mendapat kan bantuan jaminan hidup sehingga meringankan beban kebutuhan sehari-hari	2.082 orang	DITELAAH

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

22	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	koperasi		DITOLAK
23	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Demangan, Kota Yogyakarta	Rw 07 Pakuncen membutuhkan bantuan tunai bagi beberapaarganya yang lansia dan miskin serta hidup sebatangkara. Guna membantu biaya hidup dalam satu bulannya.	2.082 Orang	DITELAAH
24	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Pakuncen, Kota Yogyakarta	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin, untuk kesejahteraan para Lansia di kota Yogyakarta.	2.082 Orang	DITELAAH
25	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Gondomanan, Kota Yogyakarta	Pelatihan dilakukan warga agar peserta dapat menerapkan praktek membuat cake maupun pastry secara baik dan layak jual, serta mengetahui cara menghitung keuntungan maupun packaging yang menarik. Diharapkan menumbuhkan wirausaha baru, maupun memperkaya variasi menu bagi pelaku rintisan usaha.	20 Orang	DITELAAH
26	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	Pelatihan dilakukan warga agar peserta dapat menerapkan praktek membuat cake maupun pastry secara baik dan layak jual, serta mengetahui cara menghitung keuntungan maupun packaging yang menarik. Diharapkan menumbuhkan wirausaha baru, maupun memperkaya variasi menu bagi pelaku rintisan usaha.	20 Orang	DITELAAH
27	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	Pelatihan dilakukan warga agar peserta dapat menerapkan praktek membuat cake maupun pastry secara baik dan layak jual, serta mengetahui cara menghitung keuntungan maupun packaging yang menarik. Diharapkan menumbuhkan wirausaha baru, maupun memperkaya variasi menu bagi pelaku rintisan usaha.	20 Orang	DITELAAH
28	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	pelatihan tata rias kecantikan dimaksudkan agar dapat menerapkan praktek merias secara profesional dan berpeluang menekuni wirausaha baru dibidang kecantikan.	20 Orang	DITELAAH
29	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	pelatihan tata rias kecantikan dimaksudkan agar dapat menerapkan praktek merias secara profesional dan berpeluang menekuni wirausaha baru dibidang kecantikan.	20 Orang	DITELAAH

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

30	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	pelatihan tata rias kecantikan dimaksudkan agar dapat menerapkan praktek merias secara profesional dan berpeluang menekuni wirausaha baru dibidang kecantikan.	20 Orang	DITELAAH
31	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	untuk meningkatkan ketrampilan	20 Orang	DITELAAH
32	Pelatihan Barista tingkat kota	Kelurahan Pakuncen, Kota Yogyakarta	pengembangan keterampilan untuk menjadi masyarakat mandiri serta menumbuhkan wirausaha baru seperti bisnis warung kopi yang semakin diminati segala kalangan usia	20 Orang	DITELAAH
33	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Kelurahan Pakuncen, Kota Yogyakarta	pendampingan terhadap warga usia produktif guna meningkatkan keterampilan penunjang kerja salah satunya kursus stir mobil	40 orang	DITELAAH
34	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Bantuan dalam bentuk modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4 kelompok	DITELAAH
Total : 34 Usulan					
Disetujui = 32					
Tidak Disetujui = 2					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain :

- a. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat,
- c. Memantapkan peran dan fungsi lembaga dalam koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan kerja yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel,
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan masyarakat,
- c. Memantapkan koordinasi pelaksanaan pembangunan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan para pemangku kepentingan.
- d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024.
- e. Menjadikan acuan kerja bagi seluruh seksi/sub bagian/bidang/UPT di lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
- f. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Sosial Kota Yogyakarta menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari tiap seksi dan bagian tata usaha;
2. Memperhatikan program pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
3. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya visi dan misi Walikota Yogyakarta dan amanat regulasi.

Program, kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial pada 2024 antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial daerah kabupaten/ kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 1) Penyediaan Alat Bantu
 - 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
 - 4) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - 5) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 6) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 7) Pemberian Layanan Rujukan

- UPT RPSLU Budi Dharma
 - 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

- UPT RPA Wiloso Projo
 - 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 5) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

- 4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

- 5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
6. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
- a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
7. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
- a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
8. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
- a. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja
9. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

10. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Transmigrasi
 - Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pemberlakuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berimplikasi pada nomenklatur dan indikator output sub kegiatan yang disusun pada Rencana Kerja OPD. Hal ini berdampak pada bertambahnya jumlah sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Belanja operasional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Program, kegiatan berikut pendanaannya tersaji dalam Tabel.4.1.

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.933.805.199, 00							19.508.270.681, 00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						18.933.805.199, 00							19.508.270.681, 00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nilai)</i>				A	13.974.900.804, 00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.399.647.546, 00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)</i>					165.906.420,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			165.906.420,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1.06.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>		0.00	0.00	3	9.780.900,00						3	9.780.900,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

1.06.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1	2.570.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	2.570.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.06.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1	1.880.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	1.880.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.06.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1	2.748.720,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					0.00	2.748.720,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.06.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1	2.058.720,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					0.00	2.058.720,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.06.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0.00	0.00	11	146.868.080,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	146.868.080,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.249.995.200,00							11.249.995.200,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
														Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

1.06.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah (Dokumen)				1		(KOTA YOGYAKARTA A, KOTA YOGYAKARTA A)				1			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		0.00	0.00	80		(KOTA YOGYAKARTA A, KOTA YOGYAKARTA A)			80		11.155.939.200,00	11.155.939.200,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.06.01.2.02.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	11.00		(KOTA YOGYAKARTA A, KOTA YOGYAKARTA A)			0.00		94.056.000,00	94.056.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah (Laporan)				41		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)					33.140.000,00	33.140.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.06.01.2.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	2.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)			2.00		2.320.000,00	2.320.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.06.01.2.03.00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)			1.00		1.740.000,00	1.740.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.06.01.2.03.00 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)			1		21.850.000,00	21.850.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

			SKPD (Laporan)													
1.06.01.2.03.00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0.00	0.00	12	1.740.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				12	2.610.000,00	2.610.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.06.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0.00	0.00	12	2.610.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				12	2.610.000,00	2.610.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.06.01.2.03.00 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1	1.425.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				1	2.010.000,00	2.010.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dokumen)			213	5.220.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	213	8.700.000,00	8.700.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.06.01.2.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0.00	0.00	76	1.740.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				76	5.220.000,00	5.220.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.06.01.2.05.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0.00	0.00	4	910.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				4	1.740.000,00	1.740.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

1.06.01.2.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.570.000,00						1.740.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>		0.00	0.00	132						132	1.740.000,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						697.038.160,00						706.636.702,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)</i>				72						72		
1.06.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.674.440,00						8.705.440,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>		0.00	0.00	2						2	8.705.440,00	
1.06.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						110.089.120,00						118.001.912,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>		0.00	0.00	8						8	118.001.912,00	
1.06.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						31.736.500,00						32.002.750,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>		0.00	0.00	2						2	32.002.750,00	
1.06.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						29.428.100,00						27.256.600,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>		0.00	0.00	4						4	27.256.600,00	
1.06.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.820.000,00						5.820.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

1.06.01.2.06.00	09		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				12	5.820.000,00		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					501.670.000,00							505.500.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	10		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	0.00	0.00	106		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				106	505.500.000,00		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					6.210.000,00							7.900.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.06.01.2.06.00	11		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				2	7.900.000,00		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1.410.000,00							1.450.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>	0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)					1	1.450.000,00		
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135.786.800,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		<i>Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)</i>			6		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)					6			
1.06.01.2.07.00	05	Pengadaan Mebel				58.198.900,00								-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</i>	0.00	0.00	4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)					4			
1.06.01.2.07.00	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				77.587.900,00								-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)					12			

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

										A)								
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.230.069.224,0 0				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.235.269.224,0 0	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)</i>					36									36		
1.06.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									3.800.000,00							9.000.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>			0.00	0.00	3									3	9.000.000,00	
1.06.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									8.400.000,00							8.400.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>			0.00	0.00	12									12	8.400.000,00	
1.06.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									1.217.869.224,0 0							1.217.869.224,0 0	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>			0.00	0.00	12.00									12.00	1.217.869.224,0 0	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									466.270.000,00							-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)</i>					64									64		
1.06.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									22.300.000,00							-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				1		
1.06.01.2.09.00 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	0.00	0.00	44	296.920.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				44	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.06.01.2.09.00 05		Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)</i>	0.00	0.00	15	3.475.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				15	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.06.01.2.09.00 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	0.00	0.00	40	43.575.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				40	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.06.01.2.09.00 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	0.00	0.00	2	100.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif (%)</i>			90,86	570.905.000,00						570.905.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
														Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota												570.905.000,00					Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat					6		570.905.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1.06.02.2.03.00 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota												55.710.000,00										75	55.710.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	1.06.02.2.03.00 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota												177.583.000,00										14	177.583.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	1.06.02.2.03.00 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												30.960.000,00										12	30.960.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	1.06.02.2.03.00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota												306.652.000,00										4	306.652.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												1.526.413.345,00												1.782.641.145,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

			<p>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial (%)</p> <p>Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (%)</p> <p>Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti (%)</p> <p>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial (%)</p> <p>Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti (%)</p>				100							
							89,47							
							90.32							
							88.89							
							56.41							
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							1.069.309.000,00					1.325.536.800,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP (Orang)				3620		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			3.620		
			Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (Orang)				330		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			330		

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

						360						360			
		<i>Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (Orang)</i>													
1.06.04.2.01.00 03	Penyediaan Alat Bantu						27.590.000,00						27.590.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>		0.00	0.00	15						15	27.590.000,00		
1.06.04.2.01.00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						643.364.000,00						899.591.800,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>		0.00	0.00	362						362	899.591.800,00		
1.06.04.2.01.00 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						122.656.000,00						122.656.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>		0.00	0.00	260						260	122.656.000,00		
1.06.04.2.01.00 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak						9.320.000,00						9.320.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>		0.00	0.00	5						5	9.320.000,00		
1.06.04.2.01.00 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						246.369.000,00						246.369.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>		0.00	0.00	200		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				200	246.369.000,00	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga							2.280.000,00						2.280.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>		0.00	0.00	5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				5	2.280.000,00	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan							17.730.000,00						17.730.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>		0.00	0.00	350		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				350	17.730.000,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							457.104.345,00						457.104.345,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>				500		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				500		
			<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani (Orang)</i>				45		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				45		
			<i>Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (Orang)</i>				195		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				195		
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan							174.297.345,00						174.297.345,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>		0.00	0.00	500		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				500	174.297.345,00	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							215.760.000,00						215.760.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

	1.06.05.2.02.00 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	0.00	0.00	144101	423.620.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				144101	1.599.861.030,00	
	1.06.05.2.02.00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0.00	0.00	32618	161.310.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				32918	1.058.420.940,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1.06.05.2.02.00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0.00	0.00	130	161.310.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				140	420.000.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%)			100	676.795.020,00						676.795.020,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					258.398.120,00						258.398.120,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1.06.06.2.01.00 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial (Orang)			1.000	258.398.120,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				1.000		
	1.06.06.2.01.00 01	Penyediaan Makanan					256.958.120,00						256.958.120,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>		0.00	0.00	400		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				400	256.958.120,00	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan							720.000,00						720.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>		0.00	0.00	70		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				70	720.000,00	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial							720.000,00						720.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>		0.00	0.00	70		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				70	720.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							418.396.900,00						418.396.900,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana (Organisasi Sosial)</i>				3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				3		
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana							2.160.000,00						2.160.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)</i>		0.00	0.00	3.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				3.00	2.160.000,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							416.236.900,00						416.236.900,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						1.479.737.510,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		2.024,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)</i>				320		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				320		
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			0.00	0.00	348.00	1.479.737.510,00					348.00	2.024,00 2.024,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)</i>						(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						125.182.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		2.024,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibangun (LPK)</i>				51		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				51		
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			0.00	0.00	30.00	125.182.000,00					30.00	2.024,00 2.024,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)</i>						(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						18.893.150,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		2.024,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya (Perusahaan/UKM/IKM)</i>				40		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				40		
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						18.893.150,00						2.024,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)</i>		0.00	0.00	40		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			40	2.024,00	
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						778.991.250,00					778.991.250,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase penempatan tenaga kerja (%)				71,08							
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						606.694.500,00					606.694.500,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja (Layanan)</i>				5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			5		
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						18.000.000,00					18.000.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)</i>		0.00	0.00	300		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			300	18.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						17.360.000,00					17.360.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)</i>		0.00	0.00	604		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			604	17.360.000,00	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						571.334.500,00					571.334.500,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)</i>		0.00	0.00	193		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			193	571.334.500,00	

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						172.296.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		172.296.750,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair (Orang)			1350			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				1.350		
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					0.00	0.00	200					80.686.750,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)						(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				200	80.686.750,00	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja					0.00	0.00	1350					91.610.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)						(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				1350	91.610.000,00	
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		962.592.250,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial (%)						42,22						
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		227.409.500,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah perjanjian kerja di perusahaan (Perusahaan)			448			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				479		
			Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah (%)			40.26			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				41.26		

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

2.07.05.2.01.00 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	0.00	0.00	25.00	18.736.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				25.00	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.2.01.00 02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	0.00	0.00	15	13.987.250,00					15	13.987.250,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.2.01.00 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	0.00	0.00	362	213.422.250,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				362	213.422.250,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial (Kasus) Jumlah perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja (%)			22 40.26	735.182.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A) (Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)			Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	20 41.26	735.182.750,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.2.02.00 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	0.00	0.00	4	186.008.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				4	186.008.500,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

2.07.05.2.02.00 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	0.00	0.00	24	21.378.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				24	21.378.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.2.02.00 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	0.00	0.00	2	94.318.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				2	94.318.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.2.02.00 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0.00	0.00	1	74.916.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				1	74.916.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.2.02.00 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	0.00	0.00	159	358.562.250,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				159	358.562.250,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					225.237.425,00						225.237.425,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					225.237.425,00						225.237.425,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				225.237.425,00						225.237.425,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<i>Persentase penempatan transmigran (%)</i>			100								

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024

3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang ditempatkan (KK)				6	225.237.425,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)			Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	6	225.237.425,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0.00	0.00		2	52.870.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				2	52.870.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	0.00	0.00		8	44.889.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				8	44.889.500,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	0.00	0.00		8	43.477.925,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				8	43.477.925,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03.2.01.0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga)	0.00	0.00		8	84.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)				8	84.000.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
J U M L A H							22.800.968.034,00						21.732.890.928,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Perencanaan kerja ini nantinya diimplementasikan dalam aktivitas yang bersifat operasional oleh pengampu masing-masing kegiatan. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 diharapkan prioritas program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian target kinerja. Manakala ketersediaan APBD tidak sesuai dengan kebutuhan dalam Rencana Kerja ini, maka perlu dilakukan penyesuaian volume target dan sasaran yang pada akhirnya mempengaruhi pula pencapaian target kinerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini menjadi bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Yogyakarta, Maret 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA**



DRS. MARYUSTION TONANG, MM.